

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Ketimpangan Pendapatan

2.1.1.1 Teori Ketimpangan Pendapatan

Terjadinya ketimpangan pendapatan disebabkan adanya situasi mengenai tidak dirasakannya dampak terjadinya pembangunan oleh masyarakat, karena hasilnya tidak merata (Ahmad, 2011). Menurut Todaro (2000) menyebutkan ketimpangan pendapatan dikarenakan tidak meratanya pendapat pada masyarakat dari segi hak individu hingga pada faktor-faktor produksi.

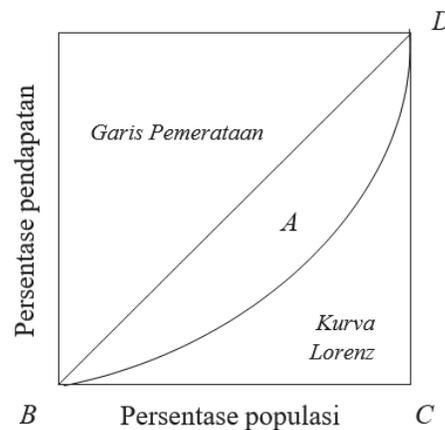
Ketimpangan adalah berbedanya pendapatan antar masyarakat yang maju dengan yang berkembang. Jauhnya perbedaan pendapatan akan mengakibatkan jauhnya perbedaan pada pendistribusi pendapatan. Sebenarnya hal ini tidak dapat dipungkiri dikarenakan efek dari *trickle down effect* dari output secara sempurna. Dimana hasil output ini hanya dirasakan sedikit bagian minoritas dengan tujuan tersendiri (Musfidar, 2012).

Penyebab distribusi pendapatan yang tidak merata menurut Adelman & Morris (dalam Arsyad, 2004) antara lain:

1. Pendapatan per kapita menurun disebabkan oleh tingginya pertumbuhan penduduk.
2. Terjadinya kondisi dimana uang bertambah terus menerus namun tidak dengan bertambahnya barang yang dapat diproduksi.
3. Tidak meratanya pembangunan antar wilayah.
4. Besarnya investasi di proyek, bagian pendapatan modal dari penambahan aset lebih besar daripada proporsi pendapatan tenaga kerja, sehingga mengakibatkan peningkatan pengangguran.
5. Menurunnya mobilitas sosial.
6. Penerapan kebijakan industrialisasi yang akan mengakibatkan naiknya harga produk-produk agar perusahaan-perusahaan terlindung.

7. Depresiasi nilai tukar antar negara berkembang dan maju, mengakibatkan rendahnya permintaan ekspor.
8. Rusaknya industri kerajinan masyarakat seperti perkayuan dan industri dalam negeri, industri rumah tangga serta hal lainnya.

Adelman dan Morris mengemukakan jika ketimpangan pendapatan daerah didasari oleh sumber daya alam, ukuran negara dan jenis pembangunan ekonomi yang dihasilkan kebijakan. Selain pertumbuhan ekonomi, aspek politik dan aspek struktural juga harus diperhatikan (Kuncoro, 2006). Adanya pendistribusian ini bertujuan dalam menentukan cara bagi masyarakat yang berpendapatan tinggi bisa memberikan dampak pada masyarakat sekitar, contohnya membantu pengurangan rakyat miskin, kemudian yang menganggur dan hal sulit lainnya yang dialami masyarakat berpendapatan kecil. Apabila pendistribusian tidak rata, akan terjadinya masyarakat yang tidak makmur dan hanya segelintir saja yang merasakan.



Gambar 2.1 Kurva Lorenz

Menurut Todaro dan Smith (2011), kurva Lorenz menunjukkan hubungan kuantitatif yang sebenarnya mengenai persentase pendapatan dengan bentuk bujur sangkar dimana posisi vertikal/lurus menjelaskan persentase kumulatif pendapatan nasional serta posisi horizontal/datar menjelaskan persentase kumulatif populasi. Kurva terletak di diagonal utama bujur sangkar, dimana jika

semakin mendekati diagonal maka semakin merata pendapatan nasional. Tetapi jika situasi memburuk dan pendistribusian pendapatan nasional tidak merata, maka bentuk kurva lorenz akan semakin menjauh dari posisi diagonal atau garis pemerataan sempurna.

Ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dapat dikelompokkan sebagai ketimpangan rendah, sedang dan tinggi. Untuk dibawah poin 0,40 tergolong ketimpangan rendah, 0,40 hingga 0,50 tergolong kategori sedang dan 0,50 hingga 0,70 termasuk ke dalam negara dengan kategori ketimpangan tinggi (Todaro, 2011).

2.1.1.2 Ketimpangan Pendapatan Menurut Perspektif Islam

Distribusi merupakan salah satu kegiatan ekonomi manusia. Studi tentang distribusi selalu menjadi perdebatan hangat dalam ekonomi Islam, karena hal tersebut menyangkut banyak sektor. Selain menyangkut sektor ekonomi juga menyangkut sektor sosial dan politik serta arus pemikiran ekonomi Islam dan konvensional (Sudarsono, 2002). Penjelasan distribusi pendapatan dalam islam juga dijelaskan dalam Surah Ar-Rum ayat 38-39, sebagai berikut:

فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ٣٨

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ ۝ ٣٩

Artinya: (38) “Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (39) Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar-Rum 30:38-39)

Berdasarkan tafsiran Ibnu Katsir pada Surah Ar-Rum ayat 38-39 menyatakan bahwa dalam ekonomi Islam, pendistribusian pendapatan sangat erat kaitannya pada nilai moral Islam dalam tercapainya kesejahteraan didunia maupun di masa yang akan datang (falah). Oleh karenanya pentingnya kita agar mengutamakan untuk sangat mendesak untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan untuk tujuan keadilan dalam ekonomi Islam.

Pendistribusian pendapatan pada sistem ekonomi Islam telah diatur sedemikian rupa sesuai Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menerapkan moral dan disiplin merupakan faktor terpenting bagi individu dalam sistem ekonomi Islam. Hal ini bertujuan mengatur alokasi distribusi pendapatan, menghindari ketidakadilan dan ketimpangan sosial (Rahmawaty, 2013).

M. Abdul Mannan merupakan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang salah satu kajiannya membahas distribusi pendapatan. Dalam pemikirannya M. Abdul Mannan menyatakan bahwa distribusi pendapatan individu dapat diselesaikan semaksimal mungkin setelah mempertimbangkan masalah kepemilikan faktor produksi. Ia memiliki pendapat yang menjadi dasar pemikirannya terkait faktor penyebab terjadinya distribusi pendapatan, diantaranya pembayaran sewa, riba dan bunga yang kontroversial, dan laba (Mannan, 1997).

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pada setiap sistem ekonomi, peran pemerintah selalu meningkat. Dari peningkatan tersebut bisa diamati dengan banyaknya pengeluaran pemerintah dalam perimbangannya terkait pendapatan nasional atau penghasilan. Dalam arti sebenarnya pengeluaran pemerintah bisa digunakan menjadi patokan banyaknya aktivitas pemerintah yang dinaungi oleh pengeluaran pemerintah. Apabila biaya yang dikeluarkan besar itu artinya aktivitas yang dilakukan pemerintah juga besar dan banyak (Estache, 2007).

Ada 4 peran pemerintah antara lain; 1) alokatif, peran untuk alokasi sumber daya ekonomi agar manfaatnya maksimal serta efisien dalam produksi; 2) distributif, peran untuk pendistribusian semua sumber daya, kesempatan dan lainnya dengan merata; 3) stabilisasi, peran menjaga kestabilan dan memperbaikinya; 4) dinamisatif, peran pemerintahan untuk bergerak menumbuhkan ekonomi (Dumairy, 1996).

Pada ekonomi konvensional, pemerintah menerima sumber pendapatan terbagi menjadi 3, yaitu dari sumber primer seperti pajak, kemudian penerimaan selain pajak dan terakhir dari hibah ataupun pinjaman luar negeri (Rahmawati, 2016). Pemerintah biasanya mengeluarkan anggaran untuk biaya-biaya pembangunan, pertahanan, kesehatan, pendidikan dan belanja rutin.

- Jenis-jenis Pengeluaran

1. Pengeluaran Rutin

Pengeluaran rutin meliputi belanja barang, pegawai, subsidi, membayar bunga utang dan lain sebagainya. Adanya pengeluaran ini membantu pemerintah memenuhi kewajibannya, melindungi masyarakat miskin dan juga menjaga kestabilan ekonomi.

2. Pengeluaran Pembangunan

Merupakan pengeluaran dalam pembiayaan pembangunan ekonomi dan umum, baik itu prasarana ataupun bukan. Tidak hanya melihat akhir namun juga melihat output dari kebijakan yang dibuat, tetap menghitung pengeluaran agar tidak mengganggu atau merugikan pihak swasta.

2.1.2.2 Pengeluaran Pemerintah Menurut Perspektif Islam

Negara memiliki kewajiban dalam kesejahteraan rakyat, seperti memberikan bantuan pada rakyat yang kurang mampu. Bantuan yang diberikan yaitu dengan mengeluarkan santunan atau melaksanakan pemberdayaan, hal ini dimasukkan dalam pengeluaran pemerintah. Negara juga wajib menyediakan sarana untuk rakyatnya, dana untuk mewujudkan hal tersebut didapatkan dari pendapatan negara. Terdapat tiga sumber penerimaan (Baitul Mal) yaitu: dari kalangan muslim (zakat, zakat fitrah, wakaf, nawa'ib, sedekah, dan amwal

fadla). Kemudian dari kalangan non muslim jizyah, kharaj, dan ushur. Dan terakhir penerimaan lainnya seperti ghanimah, fai', uang tebusan, menerima hadiah dari pemerintah negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim (Rahmawati, 2016).

Anggaran pemerintah dalam islam biasanya digunakan untuk pembiayaan pertahanan (seperti: persenjataan, kuda, unta dan persediaan), gaji (diberikan kepada muadzin, guru, imam, dan pejabat negara), upah kepada sukarelawan, membayar utang, bantuan untuk belajar agama, untuk hiburan delegasai keagamaan, pembayaran tunjangan sanak saudara Rasulullah SAW (Rahmawati, 2016). Keseimbangan terkait pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam islam mewujudkan kehendak yang harus dijadikan acuan bagi pemerintah di wilayah/negara manapun. Pemerintah sangat membutuhkan sumber pendanaan halal baik dari pajak ataupun non pajak, termasuk sumber pendanaan dari kepentingan korporasi pemerintah.

Dalam Islam, prinsip keadilan adalah keutamaan, dalam kehidupan bermasyarakat nilai ini pun harus diterapkan. Dalam menerapkannya, pemerintah diharuskan memahami peran sebaik mungkin. Prof. Ataul Huq Pramanik (dalam Irfan dan Laily, 2016) ada tiga peran, yaitu: peran yang pertama mengenai ideologi yang menjelaskan akan kebijakan dan sistem yang digunakan negara tersebut, seperti halnya mengenai konsep kepemilikan harta, regulasi dan kebijakan dalam ekonomminya. Peran yang kedua ialah pembangunan, meliputi pembangunan manusia, infrastruktur. Semakin baik pemerintah mementingkan pembangunan Sumber daya manusia nya maka pembangunan lainnya akan baik juga. Peran terakhir yaitu kesejahteraan, sangatlah wajib pemerintah memantau dan memenuhi kesejahteraan rakyatnya.

2.1.3 Jumlah Penduduk

2.1.3.1 Teori Jumlah Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk memungkinkan adanya permasalahan dan menjadi penghambat untuk membangun perekonomian (Subandi 2014). Akan semakin memburuk apabila pemerintah tidak mampu menangani dengan baik. Menurut teori Malthus, manusia berkembang lebih laju dibandingkan memproduksi produk pangan dalam pemenuhan kehidupan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan perkembangan geometris. Di sisi lain, pertumbuhan produksi pangan hanya meningkat dalam urutan aritmatika. Pertumbuhan penduduk yang jauh lebih cepat daripada pertumbuhan produksi produk pangan, sehingga menyulitkan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan.

Menurut David Ricardo, bertambahnya penduduk sebanyak dua kali lipat akan membuat membludaknya tenaga kerja. Apabila banyak tenaga kerja yang tersedia, maka upah pekerja akan turun, disaat seperti inilah ekonomi mengalami stagnan atau *stationary state* (Arsyad, 2015). Dalam kondisi seperti ini dapat menimbulkan ekonomi yang ada di suatu wilayah jadi melemah sehingga mengakibatkan kemiskinan yang meningkat.

Ada beberapa penyebab terjadinya peningkatan jumlah penduduk, yaitu fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian dan migrasi (Mulyadi, 2014). Dari tinggi rendahnya kelahiran mencerminkan kecepatan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Untuk penyebab kedua, kematian memperlihatkan kondisi yang bisa digunakan dalam menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan penduduk. Migrasi yaitu suatu kondisi dimana individu atau sekelompok orang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya.

2.1.3.2 Jumlah Penduduk Menurut Perspektif Islam

Kependudukan menurut sudut pandang islam menerangkan bahwa manusia merupakan khalifah yang mana dapat mengatur serta menata kehidupan di muka bumi secara baik agar tidak terjadi kerusakan dan tetap menjadi tempat yang layak dihuni untuk seisi bumi serta menjaga dan menggunakan sumber daya alam yang tersedia dengan semestinya, jangan sampai terjadi kelangkaan pada sumber daya tersebut akibat penggunaan yang berlebihan (Syahatah, 1998).

Maju dan mundurnya suatu peradaban erat kaitannya dengan kemakmuran atau penderitaan masyarakat, maka dari itu Ibnu Khaldun menjadikan manusia sebagai pusat pengamatan. Kemakmuran dan penderitaan masyarakat tidak serta merta bergantung di faktor-faktor ekonomi saja, tetapi di sebagian faktor lain yang ikut menentukan kualitas masyarakat, individu, dan yang lainnya.

Berdasarkan teori siklus pengeluaran penduduk, hubungan antara pengeluaran dan tingkat pengeluaran dikemukakan oleh Ibnu Khaldun. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pengeluarannya. Kedua elemen ini saling menguatkan. Populasi yang terlalu besar dapat mengakibatkan penduduk kota yang padat, yang mana hal tersebut berakibat pada terjadinya kelaparan dan kemiskinan. Manusia disebut manusia sebab keahliannya dapat menyerap semua kegunaan yang bermanfaat untuk dirinya, terhindar dari berbagai macam bahaya, dan kepribadiannya terkendali untuk memulai suatu usaha (Khaldun, 2004).

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.4.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah pertambahan kuantitas barang dan jasa yang dihasilkan akibat berkembangnya aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat disebut pertumbuhan karena adanya peningkatan kemampuan dalam memproduksi barang dan jasa dari tahun ke tahun (Sukirno, 2006).

Ukuran melihat perkembangan perekonomian itu berhasil bisa di ketahui dari pertumbuhan ekonominya. Apabila negaranya memiliki pertumbuhan ekonomi yang naik maka dapat diketahui dari perubahan apa yang secara nyata terjadi. Perubahan ekonomi negara yang signifikan bisa dilihat apabila pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat. Hal pertama yang bisa diamati dari adanya pertumbuhan ekonomi yaitu terjadinya peningkatan perekonomian, dimana hal tersebut dapat membuat pendapatan masyarakat akan meningkat pada jangka waktu tertentu (Mankiw, 2006).

Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat menjadi tanda bahwa perekonomian negara bergerak ke arah yang positif, maka upaya pembangunan negara tersebut juga berdampak baik dikarenakan meningkatnya perekonomian tersebut. Pertumbuhan ekonomi dikatakan baik disebabkan oleh peningkatan pendapatan per kapita yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional (Suparmoko, 2008). Baiknya pertumbuhan ekonomi dilihat dari tingkat pendapatan perkapita negara tersebut dimana memberi pengaruh pada naiknya pendapatan nasional. Teori ekonomi modern menjelaskan mengenai meningkatnya pertumbuhan ekonomi yaitu penyebabnya adalah peningkatan investasi, bertambahnya penduduk dan perkembangan teknologi (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa diukur dengan perkembangan pendapatan nasional salah satunya, yaitu produk domestik bruto (PDB). Tingkat pertumbuhan PDB menunjukkan proses dimana output per kapita meningkat selama periode waktu tertentu, biasanya selama periode satu tahun.

2.1.4.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam islam diartikan sebagai pertumbuhan yang berlanjut atau mengarah kearah yang benar yang bisa meningkatkan kesejahteraan umat manusia (Abidin, 2012). Beberapa penafsiran utama pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang Islam adalah mengenai batasan tentang permasalahan ekonomi. Perspektif Islam tidak sama dengan perspektif kapitalis, dimana permasalahan ekonomi berarti kekayaan dan keterbatasan

sumber daya. Kekayaan dari sudut pandang Islam, hal ini sesuai dengan modal yang Allah berikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu mengatasi permasalahan hidup manusia (Huda, 2015).

Pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi juga tercantum dalam al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 96 yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diarahkan pada penciptaan produksi, tetapi juga ditujukan pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan. Selain itu, ketundukan, kebaikan dan ketaqwaan pada aturan Allah SWT menjadi faktor utama untuk mendatangkan penghidupan, rezeki dan pembangunan ekonomi. Kemiskinan dan kekufuran mengakibatkan kemungkaran-Nya serta hilangnya ketentraman dan ketenangan.

Menurut pemikiran islam, tujuan pertumbuhan ekonomi selain untuk meningkatkan kesejahteraan juga untuk mencapai keadilan distributif. Keadilan diwujudkan dengan melakukan kebaikan kepada semua orang dalam segala keadaan, yang tujuannya adalah untuk menciptakan kesempatan bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kecukupan dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat menikmati roda perekonomian tanpa terkecuali (Huda, 2015).

Terjadinya ekonomi yang tumbuh dipandang atas kelanjutan dari faktor-faktor produksi yang dapat berkontribusi pada kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi sangat penting menurut islam. Faktor produksi yang meningkat tidak bisa dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi apabila dalam produksinya tersebut menghasilkan produk yang dapat dibuktikan membayakan manusia dan menimbulkan efek buruk. Apalagi perubahan ekonomi juga merupakan kegiatan komprehensif pada produksi, dan memiliki erat kaitannya dengan keadilan distributif (Muttaqin, 2018).

2.1.5 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Ketimpangan Pendapatan

Dalam menjalankan kegiatan perekonomian negara, tentunya pemerintah akan banyak pengeluaran. Pemerintah mempunyai tugas untuk menggerakkan perekonomian, memantau keadaan pasar dan memperbaiki apabila ada permasalahan, memastikan meratanya pendapatan masyarakat dengan menerapkan berbagai kebijakan dan program lainnya demi menghindari terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan, mengurangi inflasi dan pengangguran. Wulandari dan Rahmawati (2022) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif pada ketimpangan pendapatan, itu artinya banyaknya pengeluaran pemerintah mengakibatkan tingginya ketimpangan pendapatan. Primandani dan Yasa (2019) menyebutkan jika pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh negatif dan signifikan pada ketimpangan pendapatan.

2.1.6 Hubungan Jumlah Penduduk dengan Ketimpangan Pendapatan

Banyaknya jumlah penduduk akan berdampak baik jika hal itu diimbangi dengan catatan semua penduduk memiliki penghasilan dan bekerja, tetapi kenyataannya pekerjaan setiap orang berbeda dan penghasilan yang didapatkan juga berbeda. Perbedaan seperti jabatan juga jelas membuat beda. Hal inilah yang dapat memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Matondang (2018) memperlihatkan jika jumlah penduduk berhubungan yang positif pada ketimpangan pendapatan. Dengan arti, terjadinya peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya mengakibatkan meningkatnya ketimpangan pendapatan jika jumlahnya tidak terjadi secara rata. Widyastuti (2021) menemukan hasil jika jumlah penduduk memberikan pengaruh negatif pada ketimpangan pendapatan.

2.1.7 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Perbedaan pertumbuhan ekonomi di tiap daerah juga menentukan perbedaan pendapatan masyarakatnya, sehingga secara tidak langsung pertumbuhan ekonomi jelas memberikan pengaruh pada ketimpangan pendapatan (Kuncoro, 2004). Cingano (2014) menyebutkan jika ketimpangan

pendapatan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan hubungan negatif. Sedangkan Chambers (2010) menemukan hasil hubungan positif. Artinya meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan berlaku juga untuk ketimpangan pendapatan, begitupun sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun maka ketimpangan pendapatan juga ikut turun. Dari adanya perbedaan hubungan antara ketimpangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi memperlihatkan jika tidak selamanya pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif terhadap pemerataan pendapatan di masyarakat.

2.2 Kajian Empiris

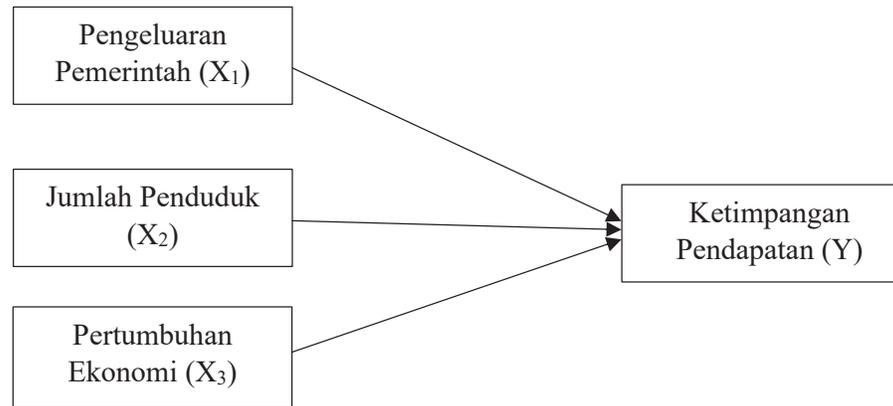
1. Islamiah, Rahmatia, Paddu dan Zamhuri (2021) menggunakan metode analisis regresi yang menunjukkan bahwa investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan, pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.
2. Danawati, Bendesa dan Utama (2016) menggunakan metode analisis jalur yang menunjukkan bahwa semua variabel bebas, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
3. Anggina dan Artaningtyas (2017) menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan, pertumbuhan investasi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Matondang (2018) menggunakan metode regresi linear berganda yang menunjukkan hasil bahwa variabel tingkat pendidikan, pengangguran dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
5. Widyastuti (2021) menggunakan metode regresi data panel dengan pendekatan FEM yang menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif signifikan, pengangguran memiliki pengaruh positif tidak signifikan, serta

jumlah penduduk berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

6. Syahri dan Gustiara (2020) menggunakan metode regresi linear berganda yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
7. Damanik, Zulgani dan Rosmeli (2018) menggunakan metode analisis jalur yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang bekerja memiliki pengaruh positif signifikan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
8. Istiqamah, Syaparuddin dan Rahmadi (2018) menggunakan metode regresi data panel yang menunjukkan pengaruh positif dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.
9. Rambey (2018) dengan metode regresi sederhana yang menunjukkan pengaruh positif signifikan dari variabel pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.
10. Juliana dan Soelistyo (2019) menggunakan metode regresi data panel yang menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan PAD memiliki pengaruh positif signifikan. IPM dan UMK memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan. Serta pendapatan perkapita memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan. Jumlah penduduk dan PAD berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan. IPM dan UMK berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan.

2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis Penelitian

2.3.1 Kerangka Konseptual



2.3.2 Hipotesis Penelitian

1. H₁ : Pengeluaran Pemerintah berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di empat negara anggota OKI tahun 2002-2018
2. H₂ : Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di empat negara anggota OKI tahun 2002-2018
3. H₃ : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di empat negara anggota OKI tahun 2002-2018